





2 Damkar Tak Tercatat Inventaris

■ Diketahui Aset Tak Bertuan Sejak 2016

■ Bangli Kekurangan Armada Pemadam Kebakaran

BANGLI, TRIBUN BALI - Kabupaten Bangli hanya memiliki empat unit armada pemadam kebakaran (damkar). Ini dinilai tak cukup untuk menanganai musibah kebakaran di Bangli. Apabila terjadi kebakaran, Bangli bahkan harus meminta bantuan kabupaten tetangga yakni Gianyar dan Klungkung.

Sekretaris Satpol PP dan Damkar Bangli, Dewa Agung Putra Suryadarma menuturkan, dua di antara empat unit mobil damkar kondisinya rusak. Kerusakan diketahui setelah pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2016.

"Saat itu, damkar yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas PU dialihkan dan digabung dengan Dinas Satpol PP dan Damkar. Pada pertengahan tahun berikutnya, kewenangan aset hingga personel sebanyak 29 orang juga ikut pindah tangan," ucap Suryadarma, Selasa (6/2).

Saat melakukan inventarisasi aset, pihaknya mendapati dua damkar namun tidak tercatat dalam buku inventaris Dinas PU. Terhadap temuan dua mobil tak

bertuan ini, pihaknya telah melaporkan kepada Sekda Bangli dengan melayangkan surat yang tertanggal 14 Desember 2017.

Walaupun rusak, dua unit damkar tersebut masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja tidak akan maksimal. Kerusakan yang dialami kedua mobil ini lebih kepada pompa penyemprot yang menyebabkan tembakan air tidak sekeras mobil damkar lainnya, meski gasnya telah ditekan.

"Bagaimana kami mau perbaiki jika asetnya belum jelas. Jika dianggarkan untuk perbaikan pun, justru akan menjadi temuan, meski tujuannya benar-benar untuk perbaikan," ujarnya.

Kepala Sub Bagian Penganggaran dan Penggunaan Barang Daerah BKPAD Bangli, I Putu Agus Mulyawan mengatakan, aset milik pemadam kebakaran yang tercatat hanya sebanyak tiga unit mobil hasil pengadaan daerah tahun 2015. Di antara tiga itu, satu di antaranya adalah mobil tangki pengangkut air. Sedangkan sisanya merupakan mobil pemadam kebakaran.

Pihaknya telah menajadwalkan penyusunan rencana kebutuhan milik daerah, sekaligus inventarisasi barang. Inventarisasi bertujuan untuk memperjelas asetnya, dengan cara mengecek ke provinsi, apakah milik provinsi, pusat, atau bahkan milik daerah yang telah dihibahkan, yang belum dibuatkan dokumen tertulisnya, namun telah diserahkan fisiknya.

"Yang jelas, sekalipun disebut barang tak bertuan, barang tersebut pasti milik negara. Tahun ini akan kami runtut asetnya tercatat di mana. Dan bilamana aset tersebut masih tercatat di pusat, bisa dilakukan pengakuan dengan memohon hibah ataupun dikembalikan ke pusat," jelasnya.

Jika barang tersebut dalam kondisi rusak, Agus Mulyawan akan negosiasi dengan pemerintah pusat. Apakah akan dihapuskan karena dianggap membebani anggaran, jika biaya perbaikannya terlalu tinggi. Intinya negosiasi dilakukan untuk mencari jalan yang dinilai efektif dan efisien. (mer)